

## ABSTRAK

Koperasi merupakan salah satu pilar perekonomian nasional yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Namun, masih rendahnya literasi masyarakat mengenai koperasi serta banyaknya koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Sumenep menjadi hambatan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam mendukung pembangunan koperasi desa dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta mengkaji implikasi ketidakpatuhan terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Isu hukum yang dikaji adalah bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan koperasi desa dan bagaimana konsekuensi hukum ketidakpatuhan terhadap Instruksi Presiden sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan *sociological jurisprudence*. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, kuesioner, serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan pembina dalam mendukung pembangunan koperasi desa melalui sosialisasi, pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Adapun ketidakpatuhan terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tidak menimbulkan sanksi pidana maupun administratif secara langsung karena Instruksi Presiden merupakan peraturan kebijakan yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun tetap dapat berimplikasi pada evaluasi kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Kata Kunci:** Pemerintah Daerah, Koperasi Desa, Instruksi Presiden.

## **ABSTRACT**

*Cooperatives are one of the pillars of the national economy, playing a role in improving community welfare through the principles of kinship and mutual cooperation. However, the public's low level of literacy regarding cooperatives, as well as the large number of inactive cooperatives in Sumenep Regency, pose obstacles to achieving village economic self-reliance. These conditions prompted the government to issue Presidential Instruction No. 9 of 2025 on Accelerating the Formation of "Merah Putih" Village/Neighborhood Cooperatives as an effort to strengthen the village-based people's economy. This study aims to analyze the role of the Sumenep Regency Local Government in supporting the development of village cooperatives and "Merah Putih" Village/Neighborhood Cooperatives, as well as to examine the implications of non-compliance with Presidential Instruction No. 9 of 2025. The legal issues examined are how local governments exercise their authority in supporting the establishment of village cooperatives and what the legal consequences are of non-compliance with the Presidential Instruction as a policy regulation (beleidsregel).*

*This study employs an empirical legal research method using a sociological jurisprudence approach. Data were collected through interviews, observations, questionnaires, and a literature review, and were then analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the study indicate that the Sumenep Regency Government, through the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry, and Trade, has fulfilled its role as a regulator, facilitator, and mentor in supporting the development of village cooperatives through outreach, mentoring, training, and facilitating the establishment of the Merah Putih Village/Neighborhood Cooperatives. Non-compliance with Presidential Instruction No. 9 of 2025 does not directly result in criminal or administrative sanctions because a Presidential Instruction is a policy regulation that is not included in the hierarchy of laws and regulations; however, it may still have implications for performance evaluations and accountability in local government administration.*

**Keywords:** *Local Government, Village Cooperatives, Presidential Instruction.*